

Ulama Jambi: Peran, Sirkulasi, dan Kebutuhan Replanting Ulama Muda

Hermanto Harun¹, Arfan^{2*}

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin, Jambi, Indonesia

*corresponding author: arfanaziz@uinjambi.ac.id

ABSTRACT:

Ulama occupy a strategic position in Jambi social landscape. Alumni of religious schools and public schools strive to appear as ulama. On the other hand, social problems are increasingly complex. This paper aims to examine the Islamic scholarly indicators in the social context of the Jambi Malay community, to explore actualization and circulation of the ulama, and the factors that cause their lack of role. Data collected through a questionnaire by grouping respondents into Old Ulama and Young Ulama. Observations and interviews were also conducted regarding the relationship between two groups in two institutions, the Indonesian Ulema Council (MUI) Jambi City and State Islamic Institute of Sultan Thaha Saifuddin Jambi which is now a university. The study found that both young and old ulama were united in their views of the importance of charismatic as main indicator of an ulama, but had different views on the role of ulama in contemporary social problems in Jambi. The Older stated that ulama still played a significant role, while the majority of young informants stated that the role of ulama was getting weaker and narrower only in Ulama Council (MUI). The study also found that the weakening of the ulama was caused by: first, the old ulama and their organizations were increasingly less independent and financially dependent on the government. Second, the charismatic ulema who are tawadu' are fading away and there is competition for influence among the old ulama. Third, ulama are divided by mass religious organizations. The researcher proposes replanting or a serious effort to "replant" ulama, especially with Sufi character, tawadu' or unpretentious attitude and charismatic. Young scholars who are cadres of mass media and have educational institutions are not sufficient to create charismatic scholars.

ARTICLE HISTORY:

Received: 2022

Accepted: 2022

Published: 1 Juni 2022

KEYWORDS:

Circulation; social role; ulama.

ABSTRAK:

Ulama menempati posisi strategis dalam lanskap sosial Jambi. Alumni sekolah agama dan sekolah umum berusaha untuk tampil sebagai ulama. Di sisi lain, problem sosial semakin kompleks. Tulisan ini bertujuan mengkaji indikasi keulamaan dalam situasi sosial masyarakat Melayu Jambi terkini, mendalami aktualisasi dan sirkulasi mereka serta faktor-faktor yang menyebabkan peran ulama tidak maksimal. Metode pengumpulan data melalui angket tertulis dengan membagi responden ke dalam dua kelompok. Observasi dan wawancara juga dilakukan terkait relasi antara ulama tua dan ulama muda pada dua institusi, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Jambi dan IAIN yang kini menjadi UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi. Penelitian mendapati bahwa ulama tua maupun muda bersatu kata dalam memandang pentingnya indikator karismatik seorang ulama, tetapi berbeda pandangan tentang peran ulama dalam masalah sosial kekinian di Jambi. Ulama tua menyatakan ulama masih berperan signifikan, sedangkan mayoritas informan dari kalangan muda menyatakan peran ulama semakin melemah dan sempit hanya sebatas organisasi Majelis Ulama. Melemahnya peran ulama disebabkan: pertama, ulama tua dan organisasinya semakin tidak independen dan bergantung secara finansial kepada pemerintah. Kedua, ulama karismatik yang tawadu' semakin memudar dan terjadi persaingan berebut pengaruh di kalangan ulama tua. Ketiga, ulama terkotak oleh organisasi massa keagamaan. Peneliti mengusulkan replanting atau usaha serius "menanam" kembali ulama, terutama ulama dengan karakter kesufian, tawadu' dan karismatik. Ulama muda yang dikader media massa dan mempunyai lembaga pendidikan belum memadai menciptakan ulama karismatik.

Kata Kunci: Peran social; sirkulasi; Ulama.

PENDAHULUAN

Masyarakat Melayu Jambi menganggap nilai-nilai Islam telah menyatu dengan nilai-nilai tradisi, hingga suatu aktivitas seperti usaha dan upacara pernikahan, dianggap ada pengaruh Islam (Bambang Husni Nugroho, 2017:13; Edy Kusnadi & Arfan, 2019:41). Slogan *adat besendi syara', syara' besendi kitabullah, syara' mengato adat memakai* (adat bersumber dari syariah, syariah bersumber dari Alquran, syariah menyebutkan hukum adat yang melaksanakan) semakin membuktikan kuatnya pengaruh Islam dalam adat Melayu Jambi (Subhan MA Rahman & Fuad Rahman, 2017:351). Beberapa kajian terdahulu mengemukakan hubungan adat dan syariat ini, namun masih terbatas sekali yang menyentuh kajian sumber daya manusia yang akan menegakkann slogan *syara' besendi kitabullah*, yaitu generasi baru ulama Jambi yang berkualitas. Kajian tentang ulama Jambi fokus terhadap ulama terdahulu, yang menyentuh sejarah hidupnya, ketokohnanya secara individual, fatwa-fatwanya, dan kitab-kitabnya (Muhammad Rosadi, 2014: 105; Asad Isma, 2017; Bambang Husni Nugroho, 2020). Berbeda dengan kajian terdahulu tersebut, tulisan ini akan membahas tentang ulama Jambi dewasa ini, terutama tentang peran sosial mereka dalam masalah-masalah sosial masyarakat Jambi pada saat ini.



Persoalan yang dihadapi masyarakat Jambi dewasa ini kembali menstimulus diskusi tentang disfungsi ulama. Masalah penggunaan narkotika, kemiskinan struktural, korupsi, bunuh diri, *incest taboo*, konflik sosioekonomi serta degradasi lingkungan, secara tidak langsung menyatakan bahwa tokoh agama absen dalam masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Terkait masalah penyalahgunaan narkotika, Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi tahun 2014 menyatakan bahwa ada hampir lima puluh ribu pengguna narkotika dan obat terlarang di Kota Jambi dan mayoritasnya adalah berusia muda. Tahun 2017, Jambi menduduki peringkat keempat nasional dengan perkiraan jumlah pengguna narkoba sekitar 53 ribu orang, yang didominasi pelajar dan mahasiswa (Kajang Lako, 2018). Seorang remaja mantan pengguna narkotika, N (Wawancara pada 2014), menyebutkan bahwa pada tahun 2014, ada beberapa tempat penyedia narkotika yang berada di sekitar lingkungannya. Bahkan, menurut seorang bekas narapidana J (Wawancara 2017), narkotika dapat diperoleh dengan sangat mudah di banyak lokasi dalam Kota Jambi, terutama Pulau Pandan yang menjadi gudangnya. J juga menyebut beberapa nama untuk menjelaskan bahwa ada keterlibatan oknum aparatur negara yang terlibat dalam bisnis narkotika di Kota Jambi. Informasi serupa juga dikemukakan oleh A yang bertempat tinggal di Cempaka Putih, Jelutung (Wawancara A 2017). Masalah sosial pengguna Narkoba di Jambi ini juga berbanding lurus dengan trend masalah sosial di Indonesia secara umum.

Angka penduduk di bawah garis kemiskinan Indonesia pada bulan September 2013 berjumlah 28,5 juta orang atau setara 11,47 persen dari total penduduk Indonesia. Di sisi lain, hasil penilaian *corruption perception index* atau indeks persepsi korupsi yang dikeluarkan oleh Transparency International pertengahan tahun 2014 lalu Indonesia masih berada di peringkat ke-107 dengan skor 34 (skala 100) dari 175 negara (Transparansi Internasional, 2014). Indonesia masih jauh berada di bawah Malaysia yang berada pada rangking 50 dunia indeks pemberantasan korupsi. Aksi kriminalitas pada November 2012, rangkuman dari laporan kejahatan di Indonesia, setiap 91 detik terjadi satu peristiwa kejahatan. Padahal, rilis Kepolisian RI dua tahun berikutnya (2014), mereka hanya mampu menyelesaikan 53% kasus dari seluruh peristiwa kriminalitas tersebut (Kompas.com, 2014). Penggunaan narkotika dan zat adiktif pula menjadikan Indonesia salah satu negara darurat narkotika dan obat-obatan terlarang. Pada November 2014, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) mengabarkan bahwa angka pengguna Narkotika di Indonesia sudah

mencapai 4,2 juta orang (Tribunnews.com, 2014). Di satu kesempatan lain dikabarkan bahwa dari jutaan pengguna narkotika 22% adalah kalangan pelajar (Harian Terbit, 2014).

Masalah sosial yang merebak seperti penggunaan narkotika ini mendorong pertanyaan tentang peran ulama dan institusi keagamaan, apakah fungsi agama untuk menjadikan hidup manusia semakin baik tidak terjadi? Dimana posisi tokoh agama dalam pencegahan dan penanganan masalah sosial? apakah ulama tidak membantu pemerintah merespon keadaan sosial ini? Adakah ulama sudah semakin berkurang, atau ulama sudah merasa mantap (*establish*) dan mapan (*status quo*) dalam lanskap sosial sekuler hingga melupakan peran serta fungsi mereka? Pertanyaan-pertanyaan kritis tersebut secara tidak langsung mempertanyakan khittah ulama. Bahkan, ada nada sinikal bahwa cendikia Islam hanya merapat saat isbat Ramadan, Idul Fitri, dan pengumuman fatwa Majelis Ulama (Riza Hadi Kusuma & Yoyok Sabar Waluyo, 2014). Padahal, menurut Thoha Hamim, keberadaan ulama dalam dinamika kehidupan masyarakat adalah menyeluruh. Kehadiran ulama diperlukan dalam memberi legitimasi teologis seluruh lingkup aktivitas sosial kehidupan umat.

Secara sejarah sosial Jambi, peran ulama di negeri *adat besendi syarak, syarak besendi kitabullah* telah ditulis oleh beberapa peneliti dan masih terawat dalam tradisi serta riwayat lisan penduduk. Di bagian Hulu Jambi, para imam, kadi, hakim dan guru madrasah dusun adalah rujukan bagi masyarakat pedesaan. Beberapa ulama yang kemudian dijadikan referensi seperti almarhum Buya Salek di Sarolangun dan Kiyai Haji Satar Saleh di Merangin. Kesederhanaan Buya Salek dan Buya Satar dianggap cermin sikap ulama yang 'takut kepada Allah'. Di hilir beberapa madrasah tradisional di seberang Kota Jambi seperti Nurul Iman, As'ad dan Sa'adatuddarayn menjadi kawah candradimuka mendidik ratusan siswa yang datang dari seluruh pelosok negeri Jambi. Kebanyakan keluarga -dari hulu hingga ke hilir- menganggap penting salah seorang anggota keluarga mengenyam pendidikan madrasah di Seberang Kota Jambi tersebut (Abu Usman, 1985; Asad Isma, 2005). Di Kuala Tungkal beberapa orang guru agama legendaris yang dikenal sebagai ulama panutan seperti almarhum Kyai Haji Ali pimpinan Pesantren Hidayatullah Islamiyah dan Kyai Haji Abdul Wahab (Wahyudi Abdul Wahab, 2012).



Namun, dalam dinamika zaman, peran sosial ulama bergeser. Ulama menjadi wakil dari lapisan sosial baru. Ulama menjadi profesi dan menjadi kelompok sosial elitis (Anuri Furqon Hadi, 2012). Kelompok pemuka agama, dengan warisan integritas dan nama baik dari ulama masa lalu, dapat terlibat mengendalikan kehidupan masyarakat muslim sekaligus menjadikan para ulama itu sejajar dengan para pejabat publik. Mereka menggenggam fondasi intelektual moral dan kuasa sosial. Dalam konteks Indonesia, fenomena Kyai Haji Zainuddin MZ (akhir abad 20), Abdullah Gymnastiar dan Ustadz Jefry Al-Buhory atau Uje (dalam millennium baru) adalah salah satu bukti pemuka agama yang menjadi representasi elit agama yang sangat populer, berjuta ummat dan menjadi *trending topic*. Akh Muzakki (Pattana Kitiarsa, 2008) menyatakan bahwa Jefry Al-Bukhory (dan Abdullah Gymnastiar) adalah salah satu simbol peralihan ulama Indonesia abad 20 ke abad 21.

Studi ini, selain mengelaborasi peran ulama, juga menggali pandangan ulama tua dan muda di Jambi terhadap pergeseran peran atau tepatnya pengelolaan model kekuasaan sosial baru di era modernitas; bagaimana respons ulama ortodoks terhadap ulama media serta kemungkinan sirkulasi ulama di masa yang akan datang *vis a vis* masalah sosial yang ada di Jambi.

METODE

Penelitian yang melatar tulisan ini menggunakan metode kualitatif. Data primer penelitian diperoleh melalui observasi, angket tertulis dan wawancara lisan. Observasi dilakukan terhadap dua institusi di Jambi, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Jambi dan Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Thaha Saifuddin Jambi. Angket diberikan kepada lima responden dari kalangan ulama tua dan 13 responden dari kalangan ulama muda. Fokus angket bukan pada kuantitas, tetapi pada variasi jawaban para responden. Data sekunder penelitian diperoleh dari tulisan sebelumnya yang berkaitan dengan tema tulisan ini, baik berupa artikel jurnal, laporan penelitian, maupun berita surat kabar dan berita dalam jaringan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Terminologi Ulama: Satu Tinjauan Ulang

Milennium baru telah semakin memantapkan keberadaan stasiun televisi swasta di Indonesia yang menjadi saluran baru “kaderisasi” ulama. Siapa saja

muslim yang memiliki keterampilan melakukan komunikasi massa dengan baik, maka akan menjadi ustaz sekaligus ulama. Akh Muzakki, dalam konteks kaderisasi jalur media ini, sependapat dengan distingsi Fatima Mernissi (1992) tentang Ulama Media dan Ulama Tradisional. Ulama Media adalah ulama yang lahir dan dibesarkan dari rahim televisi dan radio, sedangkan ulama tradisional lahir dari rahim komunitas tradisional yang berpegang kuat kepada ortodoksi agama. Distingsi itu juga terjadi di Jambi seiring kelahiran stasiun televisi lokal. Namun, media juga efektif memberi ruang dakwah lebih multi segmen, menjangkau berbagai lapisan dan profesi ummat Islam. Di Jakarta, ulama media merangkap artis adalah bukti fenomena persandingan dakwah dan hiburan (*entertainment*). Aris Saefulloh (2009) menyebutnya sebagai "dakwahtainment". Ulama modern millennium baru tersebut memegang kuasa warisan ulama tradisional seperti yang disebut oleh Endang Turmudi (2002) dan Jajat Burhanuddin (2012) dalam karya masing-masing, yaitu popularitas, kebenaran moral, status sosial dan kultural.

Ulama secara bahasa berasal bentuk jamak dari kata '*Alim* (orang yang berilmu). Dalam perkembangannya arti ulama yang awalnya berarti orang-orang berilmu telah mengalami ameliorasi kepada individu tertentu yang mendalami dan memahami ilmu-ilmu Agama (Muttoharun Jinan, 2011). Namun, pada konteks individu, Tokoh Tasawuf Al Ghazali memberi pandangan bahwa ulama dapat diklasifikasi menjadi dua: ulama baik dan ulama buruk atau ulama *su'*. Terma ulama *su'* adalah hasil refleksi Al Ghazali terhadap realitas kekhilafahan Bani Abbasiah yang tidak selalu terbimbing oleh wahyu. Muhammad Ahmad dalam tulisannya berjudul *ulama suu' ulama dunya sifatuhum wa khotoruhum 'ala ad-din wa ad-dunya* (ulama buruk - ulama dunia: sifat-sifat dan prilaku mereka terhadap agama dan dunia) mengelaborasi terma ulama *su'* Al Ghazali menjadi 11 sifat yang bisa membuat seorang ulama tergolong ulama *su'*, yaitu: 1) Menyembunyikan ilmu pengetahuan dan kebobrokan; 2) Mencintai dunia dan hatinya terikat kepada dunia; 3) Mengikuti hawa nafsu; 4) Rakus kepada jabatan dan menjilat penguasa; 5) Menipu ummat; 6) Menjual akhirat untuk dunia; 7) Mencari-cari atau memata-matai kekurangan orang lain; 8) Memberi fatwa dengan hawa nafsu; 9) Berlaku tidak adil, menghasut, provokasi untuk kebencian; 10) Berbeda perbuatan dengan ucapan; dan 11) Mengagungkan pendapat pribadi dan menolak menerima nasihat.



Dikotomi ulama buruk dan ulama baik oleh Al Ghazali menjadi epistemologi penting dalam Islam. Seburuk-buruk ulama, dalam pandangan Ghazali, adalah yang menempel di dinding kekuasaan dan sebaik-baik ulama adalah banyak menjauh dari lingkaran kekuasaan. Mereka menjadi semacam oposisi terhadap pemerintah yang tidak dibimbang oleh wahyu. Namun, perkembangan zaman juga mengembangkan perspektif ummat terhadap peran sosial para ulama. Ulama tidak hanya dilihat dari segi kualitas pribadi dan pemahaman keagamaan, akan tetapi dalam perspektif sosiopolitik dilihat juga bagaimana pengelolaan kharisma dan kuasa yang berada digenggaman seorang atau sekelompok ulama mempengaruhi kebijakan dalam lanskap sosial. Merentasi waktu, dapat saja kuasa dan kharisma itu beralih kepada ulama yang lain atas sebab-sebab sekuler duniawi maupun penegakan kembali (rekonstruksi) nilai-nilai murni agama yang dianggap telah menyimpang dan tidak dilakukan ulama yang lama. Dalam isu dekonstruksi dan rekonstruksi sosial nilai agama ini, kemudian muncul aktor-aktor baru yang menjadi ulama muda dan menjadi elit agama yang baru.

Muhammad Qasim Zaman (Zaman dan Hefner, 2002), misalnya, telah menulis tema *The Ulama in Contemporary Islam: The Custodians of Change*. Pada bab enam bukunya, Zaman mencoba membandingkan aktivisme politik keagamaan oleh ulama di beberapa negara Islam seperti Ulama Syiah di Iran, anti Syiah di Afganistan, Mesir dan lainnya. Poin penting dari studi Zaman, menurut Jajat, adalah kajiannya tentang cara-cara ulama memobilisasi tradisi untuk mendefinisikan isu-isu identitas dan otoritas agama di ruang publik (Jajat Burhanuddin, 2012: 6-7).

Khusus untuk konteks Iran, Hamid Algar (1980) dalam studinya telah menceritakan peran para ulama di periode keluarga Qajar memerintah Persia 1785-1906. Kajian Algar ini ingin melihat relasi kuasa agama dengan kuasa pemerintahan sekuler Qajar. Ulama Iran, ketika periode Qajar itu tetap konsisten dalam perannya, terutama dalam dua peristiwa utama yang melanda Iran saat itu: provokasi disebabkan kematian seorang warga Rusia, Griboyedov, dan agitasi untuk melakukan penghapusan konsesi ladang tembakau yang telah diberikan kepada perusahaan Inggris 'British Company'. Apa yang penting menurut Hamid Algar, ekspektasi yang berlebihan terhadap peran ulama di Iran akhirnya hanya akan melahirkan kekecewaan, karena ulama saat itu tidak

berperan memberikan jawaban kongkrit tentang masalah ekonomi, politik dan sosial Iran (Hamid Algar, 1980: 259).

Di Pakistan, studi Reza (2000) yang coba mendalami akar kekerasan kaum Sunni Pakistan menyatakan bahwa transformasi pendidikan sebagai buntut transformasi politik islamisasi yang dilakukan rezim "Zia ul Haque," ditambah keinginan terlibat dalam perang teluk, telah menghasilkan militansi. Ulama menjadi bagian tak terpisahkan. Madrasah Deobandi yang Sunni dan telah menghasilkan banyak kader ulama, dianggap Nasr memproduksi kelompok elit agama Pakistan yang berbeda dengan alumni Deobandi yang berasal dari tempat lain, termasuk alumni yang telah kembali ke Malaysia dan Indonesia. Persaingan internal dalam organisasi ulama Hindia (JUH-Jam'iyyat Ulama al Hindi) –sebelum Pakistan berpisah dari India-, dilihat Nasr, turut memicu sikap radikal dan militan yang akhirnya membuat friksi organisasi ulama. Sikap JUH yang mendukung partai kongres dan menentang pembentukan negara Pakistan telah melahirkan organisasi baru Jam'iyyat Ulama al Islami (JUI) yang pro negara Pakistan mandiri. Tokoh-tokoh JUI kemudian menjadi elit agama yang terlibat dalam politik pendirian negara Pakistan (Sayyed Vali Reza, 2000: 139).

Di Malaysia, studi tentang pergeseran ulama akibat institusi agama yang memproduksi mereka telah dilakukan oleh William R Roff (2004). Roff melihat terjadi transformasi ulama setelah peralihan model pendidikan agama di Malaysia, dari pondok yang tradisional, berada di utara Malaysia, menjadi madrasah yang lebih modern tersebar dibeberapa tempat, dan kemudian menjadi sekolah agama kerajaan yang mengikuti standar akademik birokrasi pendidikan pemerintah. Studi Roff ini sedikit banyak senada dengan studi Zamakhshyari Dhofier (1983) tentang tradisi pesantren di Indonesia pada awal 1980-an.

Hasil studi tentang peran ulama di Indonesia yang melintasi sejarah dewasa ini telah dilakukan secara komprehensif oleh Jajat Burhanuddin (2012). Jajat melakukan pelacakan sejarah intelektual ulama di Indonesia. Karya Jajat adalah wacana penerus dari kajian tentang ulama Indonesia yang telah dilakukan oleh banyak intelektual sebelumnya seperti Clifford Geertz (1960) yang menelurkan teori kyai Jawa sebagai pialang budaya, Dhofier (1983) tentang tradisi pesantren, Iik Arifin Mansurnoor (1990) tentang ulama di



Madura, Iskandar tentang ulama di Jawa Barat, Endang Turmudi (2004) tentang keterlibatan ulama dalam politik di Jawa Timur dan Azyumardi Azra (2003) tentang jaringan ulama Nusantara abad 17 dan 18.

Karya intelektual Jambi yang membahas tentang ulama dan pergeseran sosial mereka di Kota Jambi adalah hasil studi Kasful Anwar Us (2010) dan As'ad Isma (2005). Meski kajian kedua pendidik di UIN Jambi tersebut dipersempit pada isu model kepemimpinan di tiga pesantren dan pergeseran status sosial Tuan Guru, kajian keduanya memberi deskripsi bahwa Kota Jambi memiliki dinamika sosial keagamaan dan keulamaan seperti kota-kota santri yang berada di pulau Jawa.

Kasful Anwar Us (2010) menyoroti sirkulasi kepemimpinan di tiga pesantren yang menjadi wahana kaderisasi ulama di Kota Jambi. Pesantren yang dia teliti yaitu: a) Pesantren Nurul Iman di Seberang Kota yang menurutnya paling ideal karena bersifat kolektif dan demokratis sehingga ulama yang muncul memimpin pesantren, sekaligus ke ranah publik, adalah ulama kharismatik, b) Pesantren As'ad yang dianggapnya masih menganut pergantian kepemimpinan paternalistik, kalau tidak bisa disebut oligarkis, dan c) Pesantren Karya Pembangunan Al Hidayah yang menganut sirkulasi kepemimpinan birokratik tapi bercorak modern dengan memfungsikan manajemen pendidikan. Studi Kasful tidak hanya penting dari segi cara ulama mengelola lembaga pendidikan, akan tetapi memberikan deskripsi, seperti halnya Roff di Malaysia, bahwa tiga model pendidikan keagamaan sebenarnya masih ada di Kota Jambi, yaitu: pesantren tradisional, pesantren transisional dan pesantren modern yang diintervensi birokrasi pemerintah.

Kajian Asad Isma yang dibuat lima tahun (2005) sebelum Kasful, juga menyumbang deskripsi penting tentang kedudukan ulama pada masyarakat Kota Jambi, khususnya masyarakat Seberang Kota Jambi yang meliputi kecamatan Pelayangan dan kecamatan Danau Teluk. Ulama di Seberang Kota Jambi aktif terlibat dalam mendidik generasi muda di beberapa pesantren. Para Santri lazim memanggilnya "Tuan Guru" atau disingkat "Guru". Menurut As'ad (2005: 2), Tuan Guru adalah aktor penting dalam membentuk corak dan sistem sosial budaya masyarakat sehingga dapat dikatakan bahwa hampir semua nilai sosial budaya dan tradisi keagamaan yang berkembang sampai sekarang merupakan kontribusi, warisan (*legacy*) yang terus terpelihara keberlangsungannya lewat figur Tuan Guru tersebut.

Lebih jauh As'ad menyatakan bahwa Tuan Guru sangat kharismatik disebabkan tidak hanya pemahaman keagamaan, tetapi sikap, prilaku, pandangan, kepedulian dan integritas dalam membina masyarakat yang ada di lingkungan sosialnya. Sikap-sikap ini memang tidak hanya menjadi ciri ulama di Jambi, secara umum kharisma ulama, seperti kajian ulama ditempat yang lain, memang melibatkan kepribadian mereka sebagai unsur penentu keulamaannya. Sumber-sumber kepustakaan lain secara nasional dan lokal tentang ulama diuraikan pula di bagian lain dalam tulisan ini.

Ulama Tua, Ulama Muda dan Sirkulasi Kekuasaan Tokoh Agama

William Roff (1967) yang mengkaji tentang asal usul nasionalisme Melayu menyatakan bahwa perbedaan ulama tua dengan ulama muda itu adalah terletak kepada perbedaan menyikapi apa yang dianggap 'sumber' hukum Islam, dan respons mereka ketika mendialogkan Islam dengan tradisi lokal partikular. Ulama tua yang mempertahankan orientasi sufisme, menganggap bahwa praktek lokal orang Melayu seperti zikir, kenduri dan maulid nabi dapat diterima karena para imam mazhab juga mentolerir situasi lingkungan dan sosial dimana umat Islam berada. Sedangkan ulama muda ingin umat Islam tetap berpegang teguh kepada Alquran dan Hadits Nabi secara murni dan membersihkan agama Islam dari praktik-praktik dan sumber hukum di luar Alquran dan Hadits. Ulama Muda, dalam konteks kajian Roff di tanah Melayu Malaya, lalu memisahkan diri dari model pendidikan ulama sebelumnya. Mereka membuat madrasah dan kurikulum sendiri. Sekolah Islam Iqbal di Singapura, Madrasah Al-Hadi di Malaka dan Madrasah Al-Mashur di Penang adalah sekolah-sekolah yang mencoba mempromosikan Islam yang murni yang diperjuangkan para ulama muda. Menurut Mohamed Naweb (2007), walau reaksi ulama muda terhadap status quo elit agama itu gagal, tetapi pengaruh mereka tetap ada dalam pembentukan negara bangsa Malaysia.

Konsep ulama tua dan ulama muda William Roff dalam penelitian ini digunakan namun sekaligus dalam tafsir yang berbeda. Seperti dinyatakan di atas, setelah reformasi di Indonesia, gelombang baru muslim muda telah mendorong semakin banyak pembinaan agama melalui kelompok pengajian remaja, pengajian di Sekolah Menengah hingga di kalangan mahasiswa yang disebut *usra* atau *liqo'*. Di Jambi perkembangannya cukup pesat. Gelombang baru tersebut juga menggunakan media sekolah dasar Islam terpadu (SDIT)



yang sangat berpotensi melahirkan cendikiawan Islam masa depan, yang akan menyusul para ulama yang telah dilahirkan melalui usra dan media. Karenanya, ulama muda dan ulama tua yang dalam kajian Roff pada era perjuangan, dapat ditafsirkan menjadi ulama usra dan ulama media vis a vis ulama ortodoks yang lahir dari institusi pesantren tradisional Nahdatul Ulama di Jambi, PGAN, MUI maupun UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Penafsiran tentang ulama tua dan muda yang saling berhadapan juga termanifestasi dalam konsep sirkulasi dalam ilmu politik. Sirkulasi awalnya konsep ekonomi yang menyatakan pertukaran barang dan jasa sebagai bentuk perlawanan dari kegiatan produksi. Sedangkan dari perspektif politik, sirkulasi adalah konsep yang dikemukakan oleh Vilfredo Pareto, ilmuwan sosial politik Italia, berkaitan pergantian elit (Jary & Jary, 1991:69). Elit menurut Pareto adalah pasangan dari massa yang banyak. Ada elit ada massa. Massa dimanapun akan dikendalikan oleh segelintir elit. Namun, menurut Pareto, elit juga bisa merupakan orang yang memerintah dan orang yang tidak terlibat dalam pemerintahan. Manusia yang mampu menduduki posisi elit adalah yang paling mampu 'merasionalisasikan' tindakan non logis yang lahir dari hasrat, insting atau potensi dalam dirinya di hadapan massa. Hasrat, insting dan potensi dari elit yang dirasionalisasikan itu disebut Pareto sebagai residu. Kegiatan merasionalisasikan tindakan itu disebut dengan derivasi. Beberapa jenis saluran derivasi yang menurut Pareto dapat digunakan untuk mengolah residu adalah agama, filsafat, takhayul, peraturan tertinggi, prinsip-prinsip politik, program-program dan isme-isme.

Secara politik, ketika kuasa diraih maka yang terjadi adalah pergumulan mempertahankan kekuasaan (*power*). Kuasa dalam ruang agama tidak terkecuali. Kekuasaan dalam ruang agama juga dapat diperlebar ke ruang politik, dan kini hiburan massa, atau sebaliknya. Bahkan, era reformasi semakin membuka peluang, sekaligus melatih, elit agama terlibat langsung dalam sirkulasi kekuasaan, yaitu dengan menjadi pemuka partai politik yang baru bermunculan. Zainuddin MZ, misalnya, setelah mengalami dinamika di Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan terpinggir, kemudian mendirikan Partai Bintang Reformasi (PBR) dan terdesak oleh intrik dan serangan dari lawan-lawan politik hingga penghujung hayatnya.

Sekalipun hasrat dapat diderivasi menjadi logis dalam satu waktu, tetap saja ada rasionalisasi oleh elit yang dicurigai massa. Contohnya penolakan secara tidak langsung masyarakat Jakarta terhadap Zainuddin MZ ketika bergabung ke Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Ummat mulai menjauh. Bergesekan di PPP Zainuddin lalu mendirikan Partai Bintang Reformasi (PBR). Ummat memandang Zainuddin sudah terlibat konflik menuju kekuasaan. Kasus lain adalah penolakan ummat terhadap poligami oleh Abdullah Gymnastiar. Majelis taklim dan perusahaan yang berduyun-duyun menyambangi Darut Tauhid berkurang drastis ketika Teh Nini, istri Abdullah Gymnastiar, mengaku tersakiti karena dimadu. Dua tokoh agama itu gagal membuat derivasi atas residu. Pareto menggambarkan elit yang mampu bertahan adalah yang dapat menggabungkan dan mengkombinasikan antara residu kecerdikan dalam berpetualang seperti rubah dan residu keuletan (persistensi) memburu seperti singa. Orang yang memiliki kombinasi dua insting ini menurut Pareto adalah punya Residu Kelas Satu. Sedangkan Residu Kelas Dua adalah orang-orang yang memiliki insting kohesifitas, mencintai keluarga, kebersamaan, kecintaan kepada lembaga, negara dan perdamaian. Pergantian elit atau sirkulasi akan terjadi di antara dua kelas residu teratas ini dengan kecerdikan membuat kombinasi untuk merebut ruang kuasa.

Michel Foucault menganggap ruang sebagai hal elementer dari sirkulasi kekuasaan (Stuart & Crampton, 2007). Kekuasaan yang dimaksud kajian ini adalah kekuasaan dalam ruang agama. Henri Lefebvre dalam bukunya *The Production of Space* (1991:24), mendefinisikan ruang sebagai produk sosial. Ruang bukanlah sesuatu yang netral dan dapat diisi dengan mudah oleh siapa saja. Maka, ada dinamika dalam setiap ruang (sosial, ekonomi, politik, geografis). Kekuasaan dan dominasi memegang peranan penting dalam menguasai tiap-tiap ruang. Ruang agama tidak terkecuali. Setiap ruang memiliki sejarahnya sendiri. Masa depan situasi keagamaan sangat ditentukan oleh situasi masa kini yang juga meliputi persaingan. Dalam keadaan demikian, sebagaimana dikemukakan oleh John Gaventa (2005), ruang persaingan pun sebenarnya dapat menjadi peluang, momen, dan saluran di mana warga dapat bertindak secara potensial mempengaruhi wacana, keputusan, dan hubungan yang berdampak pada kehidupan sosial. Mengamati pertarungan berebut ruang aktualisasi dalam kalangan ulama diperlukan cara-cara empirik fenomenologis,



pengamatan dan penggalian data terhadap peristiwa yang sedang terjadi, daripada menilainya semata-mata dari sisi norma keagamaan.

Replanting Ulama

Salah satu konsep yang menjadi rujukan penelitian adalah konsep Akh Muzakki tentang ulama media versus ulama tradisional. Konsep tersebut menjadi relevan di Indonesia saat ini ketika banyak stasiun televisi nasional dan lokal menawarkan program pendakwah terfavorit yang dipilih melalui sms terbanyak atau penjurian oleh beberapa orang dewan juri. Televisi secara langsung maupun tidak langsung menjadi media baru mengkader elit agama masa depan. Secara langsung adalah melalui kontes-kontes pendakwah tadi, yang tidak langsung adalah memberi ruang bagi beberapa orang muda yang dianggap mengetahui agama, berpenampilan menarik dan menjanjikan produk sintesa antara entertainment dan dakwah Islam. Sebaliknya, ulama tradisional yang muncul dari pembelajaran serius tentang agama di lembaga salaf maupun modern, giat dan ikhlas bekerja di komunitas dan diakui keulamaanya oleh komunitas, kalah populer berbanding ulama media.

Kota Jambi yang mempunyai dua stasiun televisi swasta yang mapan, satu stasiun televisi pemerintah dan dua stasiun televisi swasta yang akan segera berdiri, menjadi arena persaingan antara dua kelompok yang dikemukakan Akh Muzakki. Beberapa tenaga pengajar di UIN Sulthan Thaha Saifuddin dan Universitas Jambi kerap menjadi pembicara dalam tema-tema agama Islam di tiga stasiun televisi yang ada. Mereka juga tidak terlibat aktif dalam MUI. Sementara ulama-ulama tua “harus mengalah” hanya menjadi pembimbing agama komunitas, majelis ta’lim ataupun hanya masuk televisi pada bulan Ramadan saja. Pertanyaan menarik yang akan muncul siapakah dari dua jenis ulama itu yang memenuhi enam kriteria sebagai ulama seperti dinyatakan oleh para informan penelitian ini? Ustadz SR, yang kerap tampil di televisi menolak tegas bahwa media massa dapat menciptakan ulama. Menurutnya, secara formal sesungguhnya organisasi dan media massa tidak bisa melahirkan ulama. Ulama terlahir dari lembaga pendidikan pesantren. Sedangkan organisasi tempat berpartisipasi atau media massa hanya sarana atau jalan baginya untuk menyampaikan pesan-pesan dakwahnya.

Informan penelitian ini, dari kaum muda, berbeda pendapat tentang keniscayaan stasisun televisi menjadi saluran kaderisasi ulama. Mayoritas mereka menganggap kaderisasi ulama tetap dilakukan oleh institusi pendidikan seperti pesantren, sedangkan televisi hanya menjadi perantara untuk berdakwah. Bahkan, dari kalangan ulama tua, MS, menganggap media massa berdasarkan pesanan, bukan kebutuhan. Dua orang informan dari ulama tua lainnya SHR dan SBH, tanpa menyebut respon mereka terhadap kaderisasi ulama melalui media massa, menyarankan Pendidikan Kader Ulama (PKU) yang pernah dilakukan oleh Kementerian Agama dilaksanakan kembali dengan memadukan materi-materi konvensional dan modern. PKU diusulkan untuk digiatkan lagi dengan penambahan wawasan, pendalaman tentang ilmu pengetahuan dan teknologi bagi para kader ulama.

SIMPULAN

Sikap karismatik, tawadu', berpengetahuan agama yang dalam, konsisten antara ilmu dan amal, dapat menjadi tauladan, serta berasal dari keluarga baik-baik adalah enam indikator utama keulamaan yang dapat dirumuskan dari para informan penelitian ini. Hasil kajian juga Ulama menemukan bahwa ulama Jambi telah melemah secara otoritas dalam merespon masalah sosial di Jambi. Berdasar kajian, dapat dirumuskan tiga sebab utama lemahnya otoritas dan respon sosial tersebut: pertama, ulama dan organisasi ulama tidak independen karena bergantung secara finansial kepada pemerintah. Ketergantungan itu menyebabkan seolah-olah Majelis Ulama menjadi stempel pemerintah. Kedua, ulama kharismatik yang memenuhi definisi para informan (enam indikator) sudah berkurang, untuk tidak mengatakan sudah punah. Ketiga, ulama terkotak oleh organisasi massa sehingga menimbulkan kecurigaan dan persaingan satu sama lain. "Penjualan jasa" ulama yang insidental dan mudah terjebak dalam suksesi politik sebagai contoh, menjadi hambatan kaderisasi ulama hingga tergerusnya ulama-ulama baik-kharismatik.

Melihat bergeser dan melemahnya peran ulama dalam masalah sosial di Jambi, replanting ulama menjadi signifikan. Sirkulasi tokoh-tokoh agama Islam dapat menjawab masalah sosial dan kemerosotan peran ulama. Semua informan penelitian ini mengemukakan harapan tersebut. Penting juga dicatat bahwa diantara para informan sudah ada yang melakukan kaderisasi ulama secara



langsung, baik melalui madrasah maupun pesantren yang telah mereka bangun. Ulama muda juga sudah mulai muncul, baik melalui "kaderisasi" media massa atau menjadi ulama yang berdakwah di organisasi atau jamaahnya masing-masing. Beberapa nama telah disebutkan oleh para informan yang berpotensi meneruskan tongkat estafet sebagai ulama masa depan di Jambi. Pendidikan Kader Ulama (PKU) dan Ma'had Aliy di UIN Jambi dianggap dapat menjadi jawaban melahirkan semakin banyak ulama untuk merespon masalah sosial Jambi sekaligus merevitalisasi marwah ulama, baik secara individu sebagai elit agama Islam kepada publik lintas agama, maupun secara organisasional mengangkat wibawa Majelis Ulama Islam (MUI) di mata masyarakat muslim di Jambi. Wallahu A'lam.

REFERENSI

- Algar, Hamid. (1980). *Religion and State in Iran, 1785-1906: The Role of The Ulama in the Qajar Period*. Los Angeles: University of California.
- Anwar, Muhammad. (2013). Modernisasi Pesantren: Pergeseran Tradisi dan Memudarnya Kyai. *Hunafa*, 10(1): 19-42.
- Aziz, Abdul. Imam Tholikhah & Soetarmen. (1989). *Gerakan Islam Kontemporer di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Azra, Azyumardi. (2003). *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII*. Jakarta: Kencana.
- Bakar, Abu Usman. (1985). *Pendidikan Islam di Jambi: Corak Madrasah dari Kebudayaan Masyarakat Seberang Kota Jambi*. Jakarta: Disertasi PPS IAIN Syahid Jakarta.
- Burhanuddin, Jajat. (2012). *Ulama dan Kekuasaan: Pergumulan elite muslim dalam sejarah Indonesia*. Bandung: Mizan.
- Dhofier, Zamakhsyari. (1983). *Tradisi Pesantren dan Pandangan Hidup Kiai*. Jakarta: LP3ES.
- Gaventa, Jhon. (2005). Reflections on the Uses of the 'Power Cube' Approach for Analyzing the Spaces, Places and Dynamics of Civil Society Participation and Engagement. *CFP evaluation series 2003-2006*, 4.
- Geertz, Clifford (1960). The Javanese Kijaji: the Changing Role of a Cultural Broker. *Comparative Studies in Society and History*, 2(2); 228-249.
- Giyanto, Arif & Budi Gunawan (2007). *Bertaruh citra dakwah: membedah kritis friksi Muhammadiyah-PKS*. Jakarta: Era Intermedia.
- Hadi, Anuri Furqon. (2012). Ulama dalam Pandangan Masyarakat Jakarta. *KARSA*, 20(1).

- Hadikusuma, Riza dan Yoyok Sabar Waluyo. (2010). Sikap dan pandangan masyarakat terhadap fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI): Studi kasus pada civitas akademika Politeknik Negeri Jakarta. *Epigram*, 7(1).
- Hasan, Hadri. (2019). Contemporary Religious Movement In Indonesia: A Study of Hijrah Festival in Jakarta in 2018. *Journal on Indonesian Islam*, 13(1).
- Hasan, Hadri & Fuad Rahman. (2013). Kualitas Keagamaan Masyarakat Jambi dan Usaha untuk Memahami Alquran. *Kontekstualita*, 28(1).
- Isma, As'ad. (2005). Pergeseran Status Sosial Tuan Guru di Seberang Kota Jambi. *Kontekstualita*, 20(1).
- Isma, As'ad. (2017). Peran Sosial Tuan Guru dalam Masyarakat Seberang Kota Jambi: Satu Tinjauan Ulang. *Kontekstualita*, 32(02).
- Jary, David and Julia Jary (1991). *Collins Dictionary of Sociology*. New York: HarperCollin Publisher.
- Jinan, Mutohharun. (2011). Dirasah Islamiyah: Relasi Ulama dan Umara dalam Sejarah Islam. *SUARA MUHAMMADIYAH* 04/96.
- Kitiarsa, Pattana (Peny.). (2008). *Religious Commodification in Asia: Marketing Gods*. New York: Routledge.
- Lefebvre, Henri. (1991). *The Production of Space*. Oxford: Basil Blackwell, 1991.
- Mansurnoor, Iik Arifin. (1990). *Islam in an Indonesian world: Ulama of Madura*. Yogyakarta: UGM Press.
- Mernissi, Fatimah. (1992). *Islam and Democracy: Fear of Modern World*. New York: Addison-Wesley.
- Mudzar, Atha'. (1993). *Fatwas of the council of Indonesian Ulama: A Study of Islamic Legal Thought in Indonesia 1975-1988*. Jakarta: INIS.
- Nasr, Sayyed Vali Reza (2000). The Rise of Sunni Militancy in Pakistan: The Changing Role of Islamism and the Ulama in Society and Politics. *Modern Asian Studies*, 34(1): 139-180.
- Naweb Mohamed Osman, Mohamed. (2007). *Towards a History of Malaysian Ulama*. Singapura: NTU.
- Nugroho, Bambang Husni. (2017). Konvergensi Adat Dan Syarak Dalam Tata Upacara Pernikahan Masyarakat Melayu Jambi. *Al-Risalah; Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan*, 17(2).
- Nugroho, Bambang Husni. (2020). *Tipologi Fatwa Ulama Jambi: Metode Ijtihad Guru Muhammad Ali ibn Abd al-Wahhab al-Tunkali dalam Kitab al-Fatawa al-Tunkaliyah*. Jakarta: Cinta Buku Media.
- Roff, William R. (2004). Pondoks, Madrasahs and the production of Ulama. *Studia Islamika*, 11(1).
- Roff, William R. (1967). *The Origin of Malays Nationalism*. New Haven: Yale University Press.

- Rosadi, Muhammad. (2014). Menelusuri Kitab Karya Ulama Pondok Pesantren di Provinsi Jambi. *Jumantara*, 5(2).
- Rozaki, Abdur. (2004). *Menabur Kharisma menuai kuasa: Kiprah kiai dan blater sebagai rezim kembar di Madura*. Yogyakarta: Pustaka Marwa.
- Saefulloh, Aris. (2009). Dakwahtainment: Komodifikasi industri media di balik ayat Tuhan. *Komunika*, 3(2).
- Stuart, Elden and Jeremy W. Crampton. (2007). "Introduction Space, Knowledge and Power: Foucault and Geography," in *Space, Knowledge and Power: Foucault and Geography*. Burlington: Ashgate.
- Subhan MA. Rahman & Fuad Rahman. (2017). The Dynamic of Malay Islamic Law: The Rise and Practices of Adat Bersendi Syarak, Syarak Bersendi Kitabullah in Jambi. *Jurnal of Indoesian Islam*, 11(2).
- Trotter, Lydia. (2006). Islam, Women and Indonesian Politics: the PKS Challenge to Substantive Theories of Democracy. *Tesis*. University of Sidney.
- Turmudi, Endang. (2002). *Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan*. Yogyakarta: LKiS.
- Ulum, Bahrul. (2006). Paradigma Keagamaan dan Politik Organisasi KAMMI Daerah Jambi. *Kontekstualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 21(1).
- Wahab, Wahyudi Abdul. (2012). Tipologi Gerakan Ulama Kuala Tungkal di Era Reformasi. *Kontekstualita*, 27(1).
- Ward, Ken. (2009). Non-violent Extremists? Hizbut Tahrir Indonesia. *Australian Journal of International Affairs*, 63(2): 149-164.
- Zaman, Muhammad Qasim & Robert W. Hefner (2007). *Schooling Islam: The Culture and Politics of Modern Muslim Education*. Princeton: Princeton University Press.
- Zaman, Muhammad Qasim. (2002). *The Ulama in Contemporary Islam, the custodians of change*. Princeton: Princeton University Press.